

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DINAS SOSIAL

JALAN MAY. JEND EL TARI TELP (0388) 31087

KEFAMENANU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai salah satu bahan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja Dinas Sosial dalam capaian program dan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian LKjIP ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya namun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menyajikan informasi yang diperlukan atas capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat diharapkan dari berbagai pihak demi kemajuan di bidang Sosial secara luas pada tahun-tahun mendatang, serta sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akan datang. Kami menghaturkan limpah terima kasih kepada semua pihak baik pimpinan maupun seluruh personil yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara atas kerjasamanya dalam penyusunan Laporan ini. Kiranya Laporan ini bermanfaat bagi pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Sosial di tahun-tahun mendatang.

Kefamenanu, 17 Februari 2025

KEPALA DINAS,

YANUARIUS MAKUN TNOBI,SS,M.SI
Pembina Utama Muda
NIP.197101102000051002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	3
D. Landasan Hukum	3
E. Sistematika	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis	5
B. Tujuan dan Sasaran	6
C. Indikator Kinerja Utama	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	22
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV. PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	<i>Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Sosial Kab. TTU</i>	7-13
Tabel 2.2.	<i>Indikator Kinerja Utama</i>	15
Tabel 2.4.	<i>Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kab. TTU</i>	16
Tabel 2.5	<i>Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. TTU</i>	17-18
Tabel 2.6	<i>Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kab. TTU</i>	19
Tabel 2.7	<i>Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. TTU</i>	19-21
Tabel 3.1.	<i>Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kab. TTU</i>	23
Tabel 3.2	<i>Perbandingan Capaian Kinerja</i>	24
Tabel 3.3.	<i>Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis</i>	25
Tabel 3.4	<i>Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi</i>	25-26
Tabel 3.5	<i>Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i>	27
Tabel 3.6	<i>Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja</i>	28 -29
Tabel 3.7	<i>Capaian Anggaran Program dan Kegiatan</i>	30-31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesejahteraan yang sebaik-baiknya dan wajib ikut serta dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UU nomor 6 tahun 1974). Landasan yuridis ini memperlihatkan secara jelas bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus terus diupayakan oleh Negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan kegiatan terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial yang ada dimasyarakat. Pembangunan disetiap bidang kesejahteraan sosial adalah mutlak dilaksanakan mengingat permasalahan sosial semakin meningkat dan kompleks. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Dinas Teknis dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) selalu menyusun program kerja serta perjanjian kinerja tahunan dalam bentuk laporan kinerja capaian organisasi.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dimana akan diukur capaian perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan, Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu

1 (satu) tahun yang menyajikan kebijakan, program kegiatan dan Sub Kegiatan

baik yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah maupun dalam bentuk motivasi bagi masyarakat guna tercapainya tujuan yang diharapkan.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

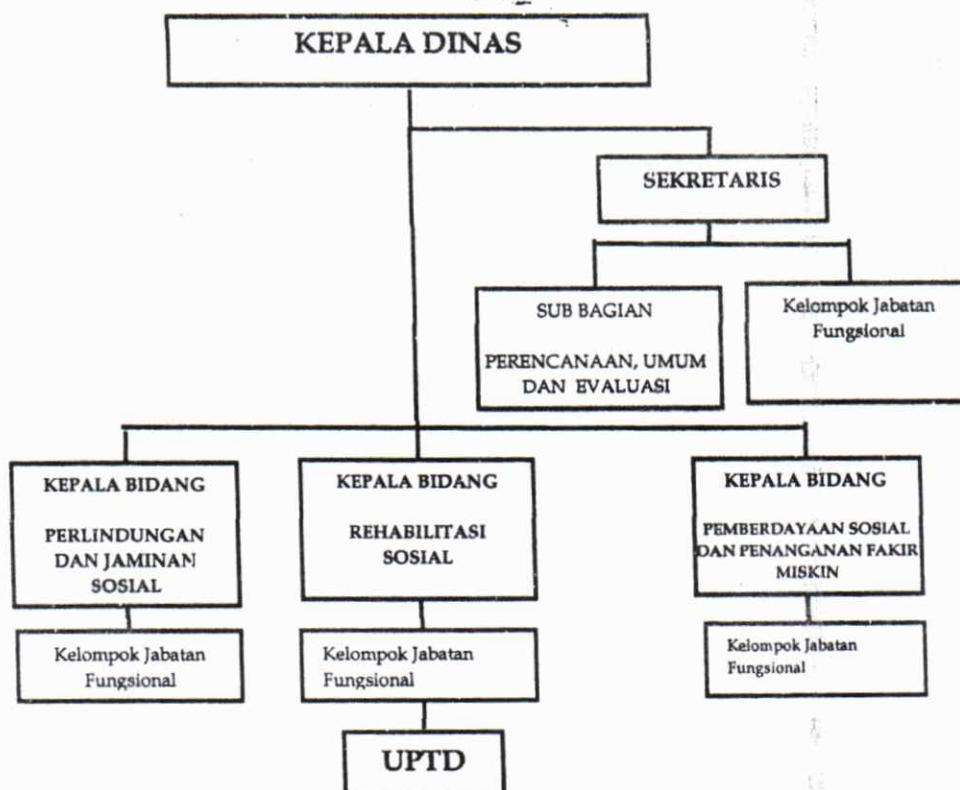
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II-b, Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III-a, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan structural eselon III-b dan Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau jabatan structural eselon IV-a.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar dan mendesak berjangka menengah atau Panjang dan menentukan pencapaian tujuan perangkat dimasa yang datang dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun, tertuang pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah dan hasil evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani oleh Dinas Sosial pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
3. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial.
4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024
5. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum Tugas dan Fungsi Isu strategis yang di hadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara para stakeholder pada Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Visi Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 adalah **“ Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam”**.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sector pertanian dan sector ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat.
 3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur.
 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.
 5. Pengembang Kawasan Strategis Daerah
- Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada Misi ke dua, yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Melalui Pembangunan , Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sebanyak 5 (lima) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
 Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kinerja aparatur agar lebih baik kreatif dan inovatif	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur serta pelayanan bagi masyarakat	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	27 org	27 org	27 org	27 org	27 org
			Tersedianya jasa administrasi pengelola jasa administrasi pengelola keuangan dan honor PTT	15 org	14 org	17 org	15 org	15 org
			Terealisasinya kegiatan monitoring evaluasi dan peningkatan kinerja perangkat daerah serta terlaksananya peringatan hari pahlawan dan HKSN	250 OH, & 2 keg	150 OH, & 2 keg	250 OH, & 2 keg	250 OH, & 2 keg	250 OH, & 2 keg
			Tersedianya komponen instalasi listrik bagi penerangan kantor	5 jns	4 jns	5 jns	5 jns	5 jns

			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (laptop)	2 unt	1 unt	-	2 unt	2 unt
			Tersedianya bahan logistic (ATK, makanan & minuman, bahan pembersih kantr, & kebutuhan pameran pembangunan	4 unt	4 unt	4 unt	4 unt	4 unt
			Tersedianya penggandaan & cetak administrasi kebutuhan ktr	2 Jns	2 jns	2 jns	2 jns	2 jns
			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	46 OH	36 OH 50 H	50 OH	50 OH	50 OH
			Tersedianya kendaraan dinas operasional untuk pelaksanaan tugas	-	1 unit roda 2	2 unit roda 2	2 unit roda 2	1 unit roda 2
			Tersedianya sarana penunjang (mebel, 1 lemari arsip dan 1 meja biro) bagi Kegiatan perangkat daerah	-	2 unit	-	-	-
			Tersedianya sarana penunjang lainnya (gorden, umbul-umbul dan kursi) pendukung kegiatan dan Gedung kantor	3 unit	-	-	-	-
			Tersedianya jasa surat menyurat untuk kelancaran administrasi dinas	678 lembar	678 lembar	678 lembar	678 lembar	678 lembar

			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang kebutuhan dinas	7 rekening	7 rekening	7 rekening	7 rekening	7 rekening
			Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor (leaptop dan printer)	27 unit	10 unit	27 unit	27 unit	27 unit
			Tersedianya kendaraan dinas operasional	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit
			Terpeliharanya Gedung kantor, LBK dan tugas HKSN	4 unit	1 unit	4 unit	4 unit	4 unit
			Terpeliharanya Gudang tempat penyimpanan barang bantuan sosial bagi	-	-	1 paket	1 paket	1 paket
2	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya pelayanan yang berkualitas bagi fakir miskin dalam mengatasi PMKS	Meningkatnya upaya pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat pada komunitas adat terpencil (KAT)	2 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi
			Meningkatnya kesejahteraan pada komunitas adat terpencil (KAT)	0 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi
			Terlaksana pendamping pekerjaan sosial, relawan sosial dalam Pembina bagi PMKS	30 orang	26 orang	30 orang	30 orang	30 orang

			Trealisasinya bantuan bagi KPM sembako dan kegiatan pendamping PBSK/TKSK	23,899K PM	22,704 KPM	21,569 KPM	20,691 KPM	20,21 2 KPM
			Trealisasinyabantu an bagi KPM PKH dan kegiatan pendampin	18,895K PM	18,518 KPM	18,148 KPM	17,786 KPM	17,43 1KPM
			SDM PKH	18,895 KPM	18,518 KPM	18,148 KPM	17,786 KPM	17,43 1 KPM
			Teralitas pembentukan dan kegiatan karang taruna di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	5 KT	2 KT	15 KT	20 KT	25 KT
			Tersedinay layanan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dalam ranka penagan PMKS	5 kasus	4 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus
3	Meningkatkan standart pelayanan minimal dalam panti atau Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) Lembaga Kesejahteraan Ssial Anak (LKSA) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam Panti maupun luar panti dan Masyarakat penerima bantuan sosial	Terlaksanya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan kekeluarga di desa/kelurahan	2 kasus	1 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus
			Terealisasinya batuan permakan bagi PMKS (lansia)	100 orang	50 orang	100 orang	100 orang	100 orang
			Terealisasinya bantuan sandang bagi PMKS (anak terlanta, lansia terlantar dandisabilitas terlantar)	10 orang	5 orang	30 orang	40 orang	50 orang

			Tersedianya alat bantu bagi penyandang disabilitas	5 orang	2 orang	15 orang	20 orang	30 orang
			Terlaksanya bimbingan teknis bagi keluarga peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis , ODGJ,BWBLP dan masyarakat	100 orang	50 orang	135 orang	150 orang	180 rang
			Tertanganinya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui sistim layanan dan rujukan terpadu (SLRT) Pusat Kesejahteran Sosial - (Puskesmas)	1 puskesmas	1 puskesmas	1 puskesmas	1 puskes	1 puskesmas
			Meningkatnya panti sosial yang meyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	1 panti	1 panti	2 panti	4 panti	6 panti
			Terlaksananya bantuan permakanan bagi PMKS	25 orang	-	25 orang	25 orang	40 orang

			Terealisasinya bantuan sosial bagi peyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	171 orang	171 orang	187 orang	203 orang	220 orang
			Penangan PMKS lainnya melalui fasilitasi bantuan sosial dan rehabilitasi sosial lainnya	100 KPM	50 KPM	100 KPM	100 KPM	100 KPM
			Meningkatnya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2 WKSBM	2 WKSBM	4 WKSBM	6 WKSBM	8 WKSBM
4	Meningkatkan kesejahteraan sosial pada Kawasan pesisir dan daerah terpencil melalui pendataan keluarga miskin dan rentan miskin dalam DTKS	Meningkatkan keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terlaksannya pembinaan dan bantuan bagi anak terlanjar	10 orang	10 orang	15 orang	20 orang	20 orang
			Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dalam rangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	25,325 KPM	28,026 KPM	30,272 KPM	33,427 KPM	36,127 KPM
			Terealisasinya bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM)	2 KUBE	2 KUBE	5 KUBE	9 KUBE	14 KUBE

			Terealisasinya bantuan bagi Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Warsosek) dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat	4 klpk	1 klpk	4 klpk	5 klpk	6 klpk
5	Meningkatkan peran serta ketersediaan Lembaga/Wahana Kesejahteraan Sosial serta kelengkapan sarana prasarana penanganan bencana untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya peran serta ketersediaan Lembaga/Wahana Kesejahteraan Sosial Karang Taruna serta tersedianya sarana dan prasarana penanganan bencana bagi pelayanan kebutuhan masyarakat	Tersedianya bantuan social bagi korban bencana	5071 korban bencana	4564 korban bencana	4108 korban bencana	3697 korban bencana	3327 korban bencana
			Terlaksananya efakuasi korban bencana menggunakan sarana prasarana tanggap Darurat	2 lokasi	2 lokasi	4 lokasi	6 lokasi	8 lokasi
			Terlaksananya bantuan bagi orang yang tergolong dalam kelompok Rentan	20 orang	2 orang	2 orang	5 orang	6 orang
			Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi kesiapsiagaan oleh taruna siaga bencana	38 tagana	38 tagana	37 tagana	37 tagana	37 tagana
			Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional cendana local	-	1 lokasi	1 lokasi	-	-
			Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional cendana loka Kabupaten TTU	1 lokasi	-	-	1 lokasi	1 lokasi

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2021-2026

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	METODOLOGI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PMKS yang mendapat bantuan di bagi PMKS seluruhnya di kali 100%	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diperoleh dari jumlah data penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gepeng yang didata dan yang dijangkau	Dinas Sosial
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase jumlah LKS yang terakreditasi	Jumlah LKS yang terakreditasi dibagi jumlah LKS seluruhnya dikali 100%.	Data diperoleh dari jumlah usulan pemohon untuk mendapatkan rekomendasi layanan akreditasi.	Bidang Pemberdayaan Sosial

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Sakip	Evaluasi oleh Inspektorat	<p>Nilai SAKIP adalah hasil penilaian terhadap penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Sosial yang mana penilaian ini meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Inspektorat Daerah. Laporan kinerja Dinas Sosial beserta data dukung SAKIP di sampaikan ke Inspektorat Daerah untuk dilakukan evaluasi dan penilaian yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi (LHE).</p>	Inspektorat Daerah
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total Unsur yg terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) sesuai ketentuan dalam Permenpan no. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.	Dinas Sosial

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2024

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 10 januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

1. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra/IKU Dinas Sosial

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya FMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%
2	Meningkatnya kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Persentase LKS yang terakreditasi	90%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai Sakip	65
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Sosial Kab.TTU sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN(Rp)
1.	Pemberdayaan KAT/ Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Presentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	49,999,999
	Rehabilitasi Sosial/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian bimbingan fisik,mental,spiritual dan sosial			99.999.763
		Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat			99.999.994
		Pemberian akses kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar			74,999,686
	Rehabilitasi social penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Penyediaan perbekalan Kesehatan di luar panti			99.999.927
		Pemberian bimbingan kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya bukab korban HIV/AIDS dan NAPZA			46.999.816

		Pemberian akses kelayakan Pendidikan dan Kesehatan dasar			74.999.833
		Pemberian layanan rujukan			99.999.832
3	Penanganan Bencana/ Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial	Penyediaan Permakanan			149.999.850
		Penyediaan Sandang			149.998.820
		Verifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah LKS Terakreditasi	90%	-
4.	Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi	Nilai Sakip	65	-
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan pada tanggal 17 Oktober Tahun 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian
Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra/IKU Dinas Sosial

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Presentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%
2	Meningkatnya kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Presentase LKS yang terakreditasi	90%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai Sakip	65
4	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN(Rp)
1.	Pemberdayaan KAT/ Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Presentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	56,919,999

2	Rehabilitasi Sosial/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian bimbingan fisik,mental,spiritual dan sosial	90%	96.299.763
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan Masyarakat		96.299.994
		Pemberian akses kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar		68,079,686
	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Penyediaan perbekalan Kesehatan di luar panti		99.999.927
		Pemberian bimbingan kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA		46.069.816

3	Penanganan Bencana/ Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial	Pemberian akses kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar			74.999.833
		Pemberian layanan rujukan			99.999.832
		Penyediaan Permakanan			161.329.850
		Penyediaan Sandang			149.998.820
4	Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi	Nilai Sakip	65	-
		Penilaian Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	-

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi untuk mempertanggung jawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara selaku pengemban tugas di bidang sosial menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara.

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal utama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Perbandingan target dengan realisasi Kinerja Tahun 2024:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Presentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90 %	100	100 %	Tercapai	Dinas Sosial
2	Meningkatnya kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Presentase LKS yang terakreditasi	90 %	100	100 %	Tercapai	Dinas Sosial
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP	65 (B)	N/A	N/A	N/A	Inspektorat Daerah
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	99,44	110,5	Tercapai	Dinas Sosial

Tabel capaian Indikator Kinerja Utama yang ditampilkan diatas belum diketahui capaian tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara karena masih dalam proses penilaian Inspektorat Daerah.

3.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2023			2022		
			Target %	Realisasi %	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian
1	Meningkatnya PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90	100	100	87,66	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Persentase LKS yang terakreditasi	90	100	100 %	87,66	100	100 %	90	90	90
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Sakip	65 (B)	N/A	N/A	65 (B)	66,50 (B)	102,31	-	57,60 (C)	57,60 (C)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	99,44	110,5	90	95,4	95,4	90	90,9	90,9

Perbandingan capaian yang ditampilkan pada table 3.2 menggambarkan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2023 dan 2022 belum diketahui karena masih dalam proses penilaian Inspektorat Daerah.

3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 sesuai target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2021-2026 :

Tabel 3.3
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90 %	100	90 %
2	Meningkatnya kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Persentase LKS yang terakreditasi	90 %	90 %	100 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Sakip	N/A	68 (B)	N/A
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,44	99,44	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2021-2026 pada table 3.4 pada keempat indikator diatas tingkat kemajuannya belum diketahui karena masih dalam proses penilaian Inspektorat Daerah.

3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil.	1	Peningkatan Kapasitas & Pendampingan KAT	90 %	100 %	100	Rencana anggaran sesuai target kinerja	Sdh dilakukan
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti	1	Pemberian bimbingan fisik mental,spri ritual dan sosial	90 %	100 %	100	Rencana anggaran sesuai target kinerja	Sdh dilakukan

			2	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Presentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90 %	100%	100%	Rencana anggran sesuai target kinerja	Sdh dilakukan
		Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	1	Pemberian perbekalan kesehatan di luar panti	Presentase LKS yang terakreditasi	90 %	100 %	100%	Ketepatan waktu dalam usulan akreditasi	Sdh dilakukan
			2	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA		90 %	100 %	100%	Rencana anggran sesuai target kinerja	Sdh dilakukan
			3	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		90 %	100 %	100%	Rencana anggran sesuai target kinerja	Sdh dilakukan
			4	Pemberian layanan rujukan		90 %	100 %	100%	Rencana anggran sesuai target kinerja	Sdh dilakukan
			3	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		90 %	100 %	100%	Rencana anggran sesuai target kinerja	Sdh dilakukan
	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1	Penyediaan Makanan		90 %	83,19 %	90%	Ketidak tepatan dalam perencanaan sesuai bencana bai k alam maupun social	Sdh dilakukan
			2	Penyediaan Sandang		90 %	96,52 %	98,52 %	Rencana anggran sesuai target kinerja	Sdh dilakukan
Meningkat nya kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Pemberdaya an Sosial	Verifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	1	Pemberian keterangan dan rekomendasi akreditasi LKS	Persentase LKS yang terakreditasi	90	100	100	Ketepatan waktu dalam usulan akreditasi	Sdh dilakukan
Meningkat nya Akuntabilit as kinerja Dinas Sosial	Penunjang urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi	1	Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP	65	N/A	N/A	N/A	N/A
Meningkat nya kualitas Pelayanan Publik			1	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	99,44	99,44	Rencana Sesuai target	Sdh dilakukan

Secara umum pencapaian kinerja Dinas Sosial untuk semua sasaran pada tahun 2024 berhasil mencapai seratus persen namun ada program dan kegiatan yang belum mencapai target disebabkan masih dalam proses penilaian Inspektorat Daerah.

3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Hasil Perkalian	Hasil Pengurangan	Efisiensi	Efisiensi *100%
1	2	3	4	5	6=3*4	7=6-5	8=7/5	9=8*100
	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	949,997,520	880,329,238	94,999,752,000	94.119.422.762	106.91	10.69
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	100%	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	N/A	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	99,44	-	-	-	-	-	-
	Rata-rata efisiensi	-						

Pada tahun 2024 persentase efisiensi analisis penggunaan sumber daya belum diketahui karena masih dalam proses penilaian Inspektorat Daerah.

3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
Meningkatnya PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90	Pemberdayaan <u>Sosial</u> . Pemberdayaan Social Komunitas Adat <u>Terpencil</u> . Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Menunjang
				Rehabilitasi <u>Sosial</u> Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti		100	Menunjang
	2.		90	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial		100	Menunjang
	3.		90	Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat		100	Menunjang

	4	S	90	Pemberian akses kelayan an Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kab./kota		100	Menunjang
	5			Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Social Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial Penyediaan perbekalan Kesehatan diluar panti		100	Menunjang
	6			Pemberian bimbingan ssial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA		100	Menunjang
	7			Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar		100	Menunjang
	8			Pembèrian layanan rujukan		100	Menunjang
	9			Penangan <u>Bencana</u> <u>Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Sosial Kab/Kota</u> <u>Penyediaan Makanan</u>		100	Menunjang
	10			Penyediaan Sandang		100	Menunjang
Meningkatnya Kualitas LKS	11	Persentase LKS yang terakreditasi	90	Verifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase LKS yang terakreditasi	100	Menunjang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12	Nilai Sakip	65	Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantran	N/A	N/A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Sosial	13	IKM	90	Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantran	99,44	menunjang

Analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan tahun 2024 yang terlaksana adalah belum diketahui karena masih dalam proses penilaian Inspektorat Daerah

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	PRGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	2.366.805.311	1.975.720.205	83,48
1	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.170.807.848	1.783.190.564	82,14
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.999.838	45.949.800	99,89
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.499.688	86.493.600	99,99
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.999.503	18.847.633	89,75
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.498.434	41.238.608	97,04
	PRGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	56.919.999	56.670.000	99,56
1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	56.919.999	56.670.000	99,56

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	581.748.851	551.086.550	94,73
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan pengemis di luar panti Sosial	260.579.443	255.562.700	98,04
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Krbn HIV/AIDS dan NPZA di luar panti Sosial	321.069.408	295.523.850	92,04
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	311.828.670	272.572.688	87,55
3	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab./Kota	311.828.670	272.572.688	87,55
	Jumlah	3.316.802.831	2.856.049.443	86,11

1. Persentase realisasi anggaran program dan kegiatan pada tabel 3.7 mencapai : 86,11 % karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat merealisasikan anggaran secara maksimal akibat dari kenaikan harga / perubahan harga
2. Salah satu anggaran makan minum bencana tidak terealisasi 100% karena hal tersebut sebagai alokasi antisipasi makan minum pada saat terjadi bencana. sebagaimana kondisi ril bahwa tahun 2024 tidak adanya kejadian luar biasa. Dengan demikian anggarannya tidak dapat digunakan secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap persentase realisasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan sebanyak 4 tujuan, 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan pertama terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 %
- Sasaran Kedua terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 %
- Sasaran Ketiga terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja dalam proses penilaian Inspektorat Daerah
- Sasaran Keempat terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,44 (baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja karena sasaran ke tiga masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat Daerah.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.316.802.831 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.856.049.443, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 86,11% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 10,63 %.

Adapun Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kefamenanu, 17 Februari 2025

KEPALA DINAS



YANUARIUS MAKUN TNOBI,SS,M.SI
Pembina Utama Muda
NIP.197101102000051002